

SKRIPSI

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DI WILAYAH PESISIR KELURAHAN LONRAE, KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR, KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh:

**NURUL FAUZIYAH
D101191015**



**DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
GOWA
2024**



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DI WILAYAH PESISIR KELURAHAN LONRAE, KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR, KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

NURUL FAUZIYAH

D101191015

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian
Studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M. Si
NIP. 19661218 199303 2 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Ir. Wiwik Wahidah Osman, S.T., M.T
NIP. 19681022 200003 2 001

Ketua Program Studi



Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si
NIP. 19741006 200812 1 002



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Nurul Fauziyah
NIM : D101191015
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Wilayah Pesisir
Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone**

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Semua informasi yang ditulis dalam skripsi yang berasal dari penulis lain telah diberi penghargaan, yakni dengan mengutip sumber dan tahun penerbitannya. Oleh karena itu semua tulisan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Apabila ada pihak manapun yang merasa ada kesamaan judul dan atau hasil temuan dalam skripsi ini, maka penulis siap untuk diklarifikasi dan mempertanggungjawabkan segala resiko.

Segala data dan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan skripsi, yang akan dipublikasi oleh Penulis di masa depan harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Gowa, 6 Maret 2024

Yang Menyatakan


Nurul Fauziyah



ABSTRAK

NURUL FAUZIYAH. *Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Wilayah Pesisir Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone* (dibimbing oleh Mimi Arifin dan Wiwik Wahidah Osman)

Kelurahan Lonrae merupakan kawasan permukiman kumuh berat yang rawan terhadap bencana di Kabupaten Bone. Sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan permukiman dengan permasalahan utama kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sementara pesisir Lonrae didukung oleh potensi perikanan. Maka diperlukan upaya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh sebagai upaya penanggulangan permasalahan kekumuhan. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di wilayah pesisir Lonrae, 2) menganalisis tingkat kerentanan permukiman di wilayah pesisir Lonrae, dan 3) merumuskan strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah pesisir Lonrae. Penelitian ini dilakukan pada kawasan pesisir Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan metode statistik deskriptif, analisis deskriptif kualitatif, analisis spasial, dan metode campuran kuantitatif dan kualitatif yaitu analisis *strength, weakness, opportunities* dan *threats* (SWOT) menggunakan perhitungan *Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS)* dan *External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) karakteristik permukiman di pesisir Lonrae didominasi oleh penggunaan lahan permukiman dengan resiko bencana berupa banjir rob, angin puting beliung dan kebakaran, didominasi oleh bangunan non permanen, prasarana jalan, drainase, air bersih, air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran yang belum optimal, masyarakat dominan bekerja di sektor perikanan, tingkat pendidikan dan pendapatan yang masih rendah serta komunitas masyarakat yang tidak bekerja secara optimal. 2) tingkat kerentanan permukiman kumuh pada wilayah pesisir Lonrae berada pada kelas tinggi. 3) strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh wilayah pesisir Lonrae yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, pengembangan kawasan mangrove serta pemberdayaan masyarakat siaga bencana dalam meminimalisir dampak bencana, dan pemberdayaan masyarakat perempuan melalui pengembangan kelompok usaha.

Kata Kunci: Permukiman Kumuh, Kualitas Lingkungan, Kawasan Pesisir, Kelurahan Lonrae, Kabupaten Bone



ABSTRACT

NURUL FAUZIYAH. *Strategies for Improving the Quality of Coastal Slums in Lonrae Village, Tanete Riattang Timur District, Bone Regency* (supervised by Mimi Arifin and Wiwik Wahidah Osman).

Lonrae Village is a severely dilapidated settlement area prone to disasters in Bone Regency. This has led to a decline in the quality of the settlement environment, in which main problem are due to inadequate infrastructure and facilities. Meanwhile, the Lonrae coast is supported by fishery potential. Therefore, efforts are needed to improve the quality of slum settlements as an alternative to the slum problem. This research aims to: (1) identify the characteristics of slums in the coastal area of Lonrae, (2) analyze the level of vulnerability of settlements in the coastal area of Lonrae, and (3) create strategies to improve the quality of slums in the coastal area of Lonrae. This research was conducted in the coastal area of Lonrae Village, Tanete Riattang Timur District, Bone Regency. The research methods used were quantitative analysis which were descriptive statistics, qualitative descriptive analysis, spatial analysis, and mixed method of quantitative and qualitative which were Strength, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT) analysis, using Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) and External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) calculation. The results of this study indicate that: (1) the characteristics of settlements in the coastal area of Lonrae are dominated by the use of settlement land with disaster risks such as tidal floods, whirlwinds, and fires. They are also dominated by non-permanent buildings, roads, drainage, clean water, wastewater, waste management, and fire protection infrastructure that are not yet optimal. The majority of the community works in the fishery sector, with low education and income levels, and a community that does not work optimally; (2) the level of vulnerability of slums in the coastal area of Lonrae is in the high class; and (3) the strategy to improve the quality of coastal slums in Lonrae is improving the quality of basic infrastructure, develop mangrove areas, and empower disaster-prepared communities to minimize the impact of disasters, as well as empower women through the development of business groups.

Keyword: Slums, Environmental Quality, Coastal Areas, Lonrae Village, Bone Regency



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN & ARTI SIMBOL	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	3
1.6 Sistematika Penelitian.....	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perumahan dan Permukiman	6
2.2 Permukiman Kumuh	7
2.3 Kawasan dan Masyarakat Pesisir.....	11
2.4 Kerentanan Permukiman.....	15
2.5 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.....	19
2.6 Analisis Statistik Deskriptif	21
2.7 Analisis SWOT	21
2.8 Studi Penelitian Terdahulu.....	22
2.9 Kerangka Konsep.....	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Lokasi Penelitian.....	26
3.3 Kebutuhan Data	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5 Populasi dan Sampel	32
3.5.1 Populasi.....	32
3.5.2 Sampel.....	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
Variabel Penelitian.....	39
Definisi Operasional	42
Kerangka Penelitian.....	43



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum.....	44
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Bone	44
4.1.2	Gambaran Umum Kecamatan Tanete Riattang Timur	50
4.1.3	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.2	Karakteristik Permukiman	56
4.2.1	Kondisi Fisik Permukiman	56
4.2.2	Kondisi Non-Fisik Permukiman	95
4.3	Tingkat Kerentanan Permukiman	106
4.3.1	Kerentanan Sosial	106
4.3.2	Kerentanan Ekonomi.....	109
4.3.3	Kerentanan Fisik	112
4.3.4	Kerentanan Lingkungan.....	114
4.3.5	Analisis Kerentanan	116
4.4	Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	120

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	144
5.2	Saran.....	145

DAFTAR PUSTAKA	146
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	151
----------------------	------------

CURRICULUM VITAE	158
-------------------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.....	9
Tabel 2	Bentuk dan struktur permukiman kumuh	12
Tabel 3	Variabel kerentanan menurut beberapa literatur.....	17
Tabel 4	Variabel kerentanan permukiman.....	18
Tabel 5	Matriks SWOT	22
Tabel 5	Rangkuman studi penelitian terdahulu	23
Tabel 6	Skoring indikator dan bobot kerentanan fisik, sosial dan ekonomi	35
Tabel 7	Perhitungan IFAS	37
Tabel 8	Perhitungan EFAS	37
Tabel 9	Variabel penelitian	40
Tabel 10	Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Bone	44
Tabel 11	Topografi menurut kecamatan di Kabupaten Bone	47
Tabel 12	Jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kabupaten Bone	48
Tabel 13	Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bone tahun 2021-2022 ..	49
Tabel 14	Luas wilayah menurut desa/kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang Timur	50
Tabel 15	Jumlah penduduk Kecamatan Tanete Riattang Timur tahun 2022.....	52
Tabel 16	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Tanete Riattang Timur tahun 2022	52
Tabel 17	Luas wilayah menurut lingkungan di Kelurahan Lonrae.....	52
Tabel 18	Jumlah penduduk Kelurahan Lonrae tahun 2023	55
Tabel 19	Penggunaan lahan Kelurahan Lonrae	56
Tabel 20	Klasifikasi kepadatan bangunan	66
Tabel 21	Kepadatan bangunan.....	66
Tabel 22	Kondisi fisik bangunan	66
Tabel 23	Status kepemilikan lahan dan tempat tinggal permukiman pesisir Lonrae	70
Tabel 24	Panjang jalan menurut perkerasan pada permukiman pesisir Lonrae	73
Tabel 25	Jumlah kepemilikan WC pada permukiman pesisir Lonrae	80
Tabel 26	Pengelolaan persampahan masyarakat pesisir Kelurahan Lonrae	84
Tabel 27	Jenis mata pencaharian masyarakat pesisir Kelurahan Lonrae.....	95
Tabel 28	Tingkat pendapatan masyarakat pesisir Kelurahan Lonrae	97
Tabel 29	Tingkat pendidikan masyarakat pesisir di Kelurahan Lonrae	99
Tabel 30	Jumlah penduduk menurut asal daerah.....	101
Tabel 31	Jumlah penduduk menurut waktu domisili	102
Tabel 32	Kerentanan jumlah penduduk perempuan di pesisir Lonrae.....	106
Tabel 33	Kerentanan tingkat pendidikan di pesisir Lonrae	107
Tabel 34	Kerentanan ikatan sosial masyarakat di pesisir Lonrae	108
	Kerentanan asal daerah masyarakat di pesisir Lonrae	108
	Kerentanan waktu domisili masyarakat di pesisir Lonrae	109
	Kerentanan tingkat pendapatan masyarakat di pesisir Lonrae.....	110
	Kerentanan dari aspek mata pencaharian di pesisir Lonrae.....	110
	Kerentanan dari aspek diversifikasi ekonomi di pesisir Lonrae	111



Tabel 40	Kerentanan tipe rumah di pesisir Lonrae	112
Tabel 41	Kerentanan infrastruktur pengelolaan air limbah di pesisir Lonrae ...	113
Tabel 42	Kerentanan infrastruktur pengelolaan persampahan di pesisir Lonrae	113
Tabel 43	Ketinggian topografi di kawasan pesisir Kelurahan Lonrae.....	114
Tabel 44	Penggunaan lahan di kawasan pesisir Kelurahan Lonrae	115
Tabel 45	Jarak bangunan dari garis pantai di Kelurahan Lonrae.....	115
Tabel 46	Bobot tiap variabel kerentanan permukiman	116
Tabel 47	Klasifikasi tingkat kerentanan	117
Tabel 48	Perhitungan skor tingkat kerentanan permukiman	117
Tabel 49	Perhitungan tingkat kerentanan permukiman pesisir Lonrae.....	118
Tabel 50	Tabulasi silang faktor internal dan eksternal	124
Tabel 51	Matriks IFAS (<i>Internal Strategic Factors Analysis</i>)	126
Tabel 52	Matriks EFAS (<i>External Strategic Factors Analysis</i>)	127



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka pikir penelitian	25
Gambar 2	Peta administrasi Kabupaten Bone	27
Gambar 3	Peta administrasi Kecamatan Tanete Riattang Timur	28
Gambar 4	Lokasi penelitian	29
Gambar 5	Diagram SWOT	38
Gambar 6	Kerangka penelitian	43
Gambar 7	Peta administrasi Kabupaten Bone	46
Gambar 8	Peta administrasi Kecamatan Tanete Riattang Timur	51
Gambar 9	Peta administrasi Kelurahan Lonrae	54
Gambar 10	Peta penggunaan lahan Kelurahan Lonrae	57
Gambar 11	Kondisi genangan di kawasan permukiman pesisir Lonrae	58
Gambar 12	Kondisi pasang surut harian di kawasan permukiman pesisir Lonrae	59
Gambar 13	Persentase rumah terdampak bencana pada kawasan permukiman pesisir Lonrae	59
Gambar 14	Upaya masyarakat dalam meminimalisir dampak banjir rob	60
Gambar 15	Kondisi rumah terdampak angin puting beliung	61
Gambar 16	Kondisi rumah terdampak kebakaran	62
Gambar 17	Peta kebencanaan wilayah pesisir Kelurahan Lonrae	63
Gambar 18	Pola permukiman <i>linear</i> dan berkelompok pesisir Lonrae	64
Gambar 19	Peta pola permukiman pesisir Lonrae	65
Gambar 20	Persentase jenis bangunan pada permukiman pesisir Lonrae	67
Gambar 21	Kondisi eksisting jenis bangunan pada kawasan permukiman pesisir Lonrae	68
Gambar 22	Fungsi hunian di permukiman pesisir Lonrae	68
Gambar 23	Peta jenis bangunan permukiman pesisir Lonrae	69
Gambar 24	Diagram persentase status kepemilikan lahan kawasan permukiman pesisir Lonrae	70
Gambar 25	Diagram persentase status kepemilikan bangunan kawasan perukiman pesisir Lonrae	71
Gambar 26	Peta status kepemilikan lahan permukiman pesisir Lonrae	72
Gambar 27	Persentase jenis jalan pada kawasan permukiman pesisir Lonrae	73
Gambar 28	Kondisi jaringan jalan menurut perkerasannya	74
Gambar 29	Peta jaringan jalan permukiman pesisir Lonrae	75
Gambar 30	Kondisi eksisting drainase pada kawasan permukiman pesisir Lonrae	76
Gambar 31	Peta jaringan drainase permukiman pesisir Lonrae	77
Gambar 32	Sumber air bersih masyarakat permukiman pesisir Lonrae	78
Gambar 33	Peta titik sumber air bersih permukiman pesisir Lonrae	79
Gambar 34	Persentase kepemilikan WC	80
Gambar 35	Kondisi sarana pengelolaan air limbah permukiman pesisir Lonrae	81
Gambar 36	Peta titik pembuangan air limbah permukiman pesisir Lonrae ...	82
Gambar 37	Kondisi sarana persampahan pada kawasan permukiman	



	pesisir Lonrae	83
Gambar 38	Diagram pengelolaan persampahan masyarakat permukiman pesisir lonrae.....	84
Gambar 39	Peta titik pembuangan sampah pada permukiman pesisir Lonrae.....	85
Gambar 40	Peta sarana pendidikan permukiman pesisir Lonrae	88
Gambar 41	Peta sarana kesehatan permukiman pesisir Lonrae	89
Gambar 42	Peta sarana peribadatan permukiman pesisir Lonrae	90
Gambar 43	Peta sarana perkantoran permukiman pesisir Lonrae.....	91
Gambar 44	Peta sarana perdagangan permukiman pesisir Lonrae.....	92
Gambar 45	Peta sarana perikanan permukiman pesisir Lonrae	94
Gambar 46	Diagram persentase jenis pekerjaan masyarakat pesisir permukiman pesisir Lonrae	96
Gambar 47	Diagram persentase tingkat pendapatan masyarakat pesisir permukiman pesisir Lonrae	97
Gambar 48	Peta sebaran mata pencaharian masyarakat permukiman pesisir Lonrae	98
Gambar 49	Diagram tingkat pendidikan masyarakat pesisir Lonrae	99
Gambar 50	Peta sebaran tingkat pendidikan masyarakat pesisir Lonrae	100
Gambar 51	Persentase asal daerah masyarakat pesisir Lonrae	102
Gambar 52	Persentase waktu domisili masyarakat pesisir Lonrae	102
Gambar 53	Kegiatan melaut masyarakat Lonrae	104
Gambar 54	Peta lokasi komunitas masyarakat permukiman pesisir Lonrae..	105
Gambar 55	Peta tingkat kerentanan lingkungan permukiman pesisir Lonrae.....	119
Gambar 56	Diagram SWOT IFAS dan EFAS.....	129
Gambar 57	Peningkatan kualitas jaringan jalan titian kayu	130
Gambar 58	Pemeliharaan jaringan drainase	131
Gambar 59	Ilustrasi penerapan konsep bio septic tank pada rumah zona perairan.....	132
Gambar 60	Peta arahan pengelolaan persampahan pada permukiman pesisir Lonrae	134
Gambar 61	Peta arahan pengadaan proteksi kebakaran pada kawasan permukiman pesisir Lonrae	136
Gambar 62	Ilustrasi pengembangan kawasan mangrove	137
Gambar 63	Peta ilustrasi pengembangan kawasan mangrove pada permukiman pesisir Lonrae	138
Gambar 64	Bentuk pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana oleh Pemerintah Kabupaten Bone	140
Gambar 65	Pemberdayaan kelompok usaha bolu cukke.....	141
Gambar 66	Pemberdayaan kelompok usaha pengeringan ikan.....	142
Gambar 67	Peta arahan pemberdayaan kelompok usaha	143



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi pengisian kuesioner dan wawancara kepada masyarakat permukiman pesisir Lonrae	152
Lampiran 2	Dokumentasi observasi lapangan pada kawasan permukiman pesisir Lonrae	152
Lampiran 3	Kuesioner penelitian	153
Lampiran 4	Kuesioner SWOT	156



DAFTAR SINGKATAN & ARTI SIMBOL

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
APAR	Alat Pemadam Api Ringan
BNPB	Badan Nasional Penganggulangan Bencana
BPS	Badan Pusat Statistik
KK	Kartu Keluarga
PERMEN	Peraturan Menteri
PPI	Pangkalan Pendaratan Ikan
PUPR	Pekerjaan Umum Penataan Ruang
RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SBWP	Sub Bagian Wilayah Perkotaan
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>
TPI	Tempat Pelelangan Ikan
TPS	Tempat Pembuangan Sampah Sementara



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat *Allah Subhanahu wa Ta'ala* Karena rahmat berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Wilayah Pesisir Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone”** ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Lonrae yang termasuk salah satu kawasan permukiman kumuh berat di Kabupaten Bone. Pada kawasan permukiman khususnya wilayah pesisir terdapat permasalahan yang cukup kompleks seperti padatnya bangunan, pengelolaan persampahan yang buruk hingga kawasan permukiman yang rawan banjir. Hal tersebut yang menjadi alasan pemilihan tema dan judul dalam penelitian ini. Maka penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji karakteristik permukiman, tingkat kerentanan permukiman dan strategi dalam peningkatan kualitas guna menangani permasalahan kekumuhan pada kawasan permukiman pesisir Kelurahan Lonrae. Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi serta menjadi pertimbangan dari produk rencana tata ruang kedepannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat dibutuhkan oleh penulis untuk peningkatan kualitas penelitian yang lebih baik ke depannya. Harapannya, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, 6 Maret 2024



Nurul Fauziyah

Sitasi dan Alamat Kontak:

Harap menuliskan sumber skripsi dengan cara penulisan sebagai berikut:

Fauziyah. Nurul. 2024. *Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Wilayah Pesisir Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone*. Skripsi Sarjana, Prodi S1 PWK Universitas Hasanuddin.



Peningkatan kualitas dari skripsi ini, kritik dan saran dapat dikirimkan ke melalui alamat email berikut: ucitaslim00@gmail.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran *Allah Subhanahu wa Ta'ala* atas kehendak dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan dan panutan kita, Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi wasallam* yang telah menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada umat manusia hingga saat ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Taslim M, S.Pd. dan Ibu Rahmawati, S.Pd.) serta kakak tercinta penulis (Farhan Taslim, S.T) atas cinta, doa, curahan kasih sayang, waktu, kesabaran dan dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada penulis;
 2. Rektor Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.) atas segala nasehat, kebijakannya dan dukungannya selama penulis menempuh pendidikan;
 3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT) atas dukungan dan segala kebijakannya;
 4. Ketua Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (Bapak Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si.) atas segala motivasi, bimbingan dan nasehat yang telah diberikan;
 5. Sekretaris Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Ibu Sri Aliah Ekawati, ST., MT) atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan;
 6. Dosen Pembimbing Akademik (Bapak Prof. Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT) atas segala bimbingan, nasihat dan dukungannya;
 7. Dosen Pembimbing Utama sekaligus Kepala LBE Perumahan dan Permukiman (Ibu Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si) untuk setiap waktu, kesempatan dan tenaga yang telah diluangkan demi membimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;
 8. Dosen Pembimbing Pendamping (Ibu Dr. Ir. Wiwik Wahidah Osman, S.T., M.T) untuk setiap waktu, kesempatan dan tenaga yang telah diluangkan demi membimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;
 9. Dosen Penguji (Ibu Jayanti Mandasari Andi Munawarah Abduh, ST., M. Eng) atas ilmu, bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir;
 10. Dosen Penguji (Bapak Gafar Lakatupa, ST., M. Eng) atas ilmu, bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir;
 11. Kepala Studio (Ibu Dr.techn. Yashinta K.D. Sutopo, ST., MIP) yang tiada hentinya membimbing, mendukung dan memotivasi kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir;
- terima kasih kepada dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atas segala ilmu, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan;



13. Seluruh staf administrasi dan pelayanan di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Haerul Muayyar, S.Sos., dan Bapak Faharuddin) atas bantuannya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan hingga lulus;
14. Teman-teman SEKTOR 2019, teman-teman seperjuangan *Labo-based Education (LBE) Housing and Settlement*, teman-teman Studio Akhir, atas segala suka cita, kebersamaan, pengalaman, dukungan dan kemurahan hati untuk berbagi ilmu serta rasa persaudaraan yang telah terjalin selama masa perkuliahan;
15. Sahabat-sahabat seperantauan penulis (Anisah Darinda, Dwi Febriza Doktrin, Asma Amne Ambarwati, Muhammad Fadil Fajar, dan Putri Haerani Rustam) yang senantiasa menjaga, memberikan kasih sayang, kebahagiaan, dukungan, dan nasehat kepada penulis selama menjalankan masa perkuliahan;
16. Sahabat-sahabat terkasih penulis (Maqh'firah Annisa, S.Psi dan Andi Adillah Safitri, S.P) yang senantiasa selalu ada, memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan kebahagiaan kepada penulis;
17. Kepada masyarakat Kelurahan Lonrae atas dukungan dan kebaikan hati untuk mendukung penulis selama melakukan penelitian ini;
18. Semua pihak yang telah berkontribusi, mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari ucapan terima kasih tak akan mampu membalas kebaikan hati pihak-pihak terkait, semoga *Allah Subhanahu wa Ta'ala* membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. *Aamiin yaa Rabbal 'alamin*.

Gowa, 6 Maret 2024



(Nurul Fauziyah)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akan berakibat terlampauinya kapasitas lahan untuk permukiman. Urbanisasi yang tidak terkendali akan berakibat terhadap adanya krisis perumahan. Akibatnya permintaan lahan untuk permukiman juga semakin meningkat sementara ketersediaan lahan yang cenderung tidak bertambah. Dampak yang terjadi setelahnya adalah permukiman kumuh berkembang pada daerah-daerah yang pengawasannya kurang baik atau tidak terjaga. Lahan-lahan yang tidak seharusnya diperuntukkan untuk permukiman sekalipun telah ditempati oleh rumah mukim yang ukurannya kecil, tata letaknya tidak teratur, dan kualitas bangunannya yang sangat sederhana dan tidak layak huni (Rindarjono, 2017).

Wilayah pesisir menjadi kawasan yang paling strategis dan pesat pertumbuhannya. Selain dikarenakan sulitnya mendapatkan lahan di daerah pusat kota, wilayah pesisir juga memiliki potensi ekonomi yang tidak hanya memanfaatkan sumber daya darat tetapi juga sumber daya laut (Rahman, 2018). Oleh karena itu, wilayah pesisir memiliki kebutuhan lahan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan terbentuknya kawasan yang sangat padat (Kusumo, 2022). Masyarakat pada kawasan pesisir umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan memilih tempat bermukim pada wilayah pesisir dikarenakan adanya ketersediaan lahan, ketersediaan fasilitas, kedekatan dengan tempat bekerja dan kedekatan dengan kerabat (Rindarjono, 2017).

Permasalahan terbentuknya kawasan permukiman kumuh di wilayah pesisir juga terjadi di Kabupaten Bone. Berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 481 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bone Tahun 2020, total luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bone mencapai 254,55 Ha dan terbagi menjadi 8 kawasan. Salah satunya adalah Kawasan Bajoe yang terbagi atas 6 blok dengan luas kawasan mencapai 60,94 Ha dan didominasi oleh kawasan dengan tingkat kepadatan berat. Kawasan permukiman nelayan Lonrae menjadi salah satu



kawasan permukiman kumuh dengan luas 18,8 Ha dan termasuk dalam tingkat kekumuhan berat.

Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) Kawasan Perkotaan Watampone, Kelurahan Lonrae termasuk dalam zona rawan bencana dengan peruntukkan sebagai kawasan permukiman kepadatan sedang dan kawasan perikanan. Hampir setiap tahun bencana banjir melanda Kelurahan Lonrae, hal tersebut disebabkan oleh letak geografis yang berupa dataran rendah dan lahan yang berbentuk cekung.

Terlepas dari masalah kekumuhan dan rawan bencana, Kelurahan Lonrae memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar, hal tersebut yang menjadi dasar terbentuknya kawasan permukiman pesisir yang didominasi oleh masyarakat bermatapencaharian sebagai nelayan. Apalagi kawasan permukiman ini terletak di sekitar Pelabuhan Bajoe dan Pelabuhan Perikanan Lonrae yang menjadi tempat perkumpulan nelayan di pesisir pantai Teluk Bone.

Permukiman nelayan sepanjang pesisir Kelurahan Lonrae menjadi salah satu kawasan tidak layak huni mengingat permasalahannya penurunan kualitas lingkungannya seperti jarak hunian cukup padat dengan akses dan lebar jalan yang tidak memadai, sistem pengelolaan persampahan yang buruk karena masyarakat memilih membuang sampah langsung di laut hingga sistem air limbah yang mencemari lingkungan sekitarnya (Pratiwi, 2021).

Melihat permasalahan yang terdapat pada kawasan permukiman pesisir Lonrae dan ditunjang oleh potensi kawasan khususnya kegiatan perikanan serta mengacu pada ketentuan pemanfaatan ruang pada RDTR Kawasan Perkotaan Watampone, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis karakteristik dan tingkat kerentanan permukiman kumuh pesisir Kelurahan Lonrae terhadap ancaman bencana serta perumusan strategi sebagai upaya peningkatan kualitas kawasan permukiman pesisir untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang rawan bencana.



1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik permukiman kumuh di wilayah pesisir Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone?
2. Bagaimana tingkat kerentanan kawasan permukiman di wilayah pesisir Kelurahan Lonrae ,Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone?
3. Bagaimana strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah pesisir Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di wilayah pesisir Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
2. Menganalisis tingkat kerentanan kawasan permukiman di wilayah pesisir Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
3. Merumuskan strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah pesisir Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan keilmuan kepada peneliti dalam perumusan strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh khususnya pada wilayah pesisir.
2. Menjadi alternatif atau acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam menentukan kebijakan/perencanaan pada kawasan permukiman kumuh, sehingga perencanaan program dapat memberikan manfaat dan tepat sasaran.



di sumber pengetahuan bagi masyarakat setempat terkait dengan kondisi strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh.

erikan informasi dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian lainnya yang terkait dengan bidang permukiman kumuh.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan suatu batas dalam membahas penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ruang lingkup materi dan lingkup wilayah. Berikut penjelasan lingkup dan batasan penelitian:

1. Ruang Lingkup Materi

Lingkup materi yang digunakan dalam penelitian ini membahas batasan-batasan teori yang digunakan dan disesuaikan dengan kajian pustaka dengan tema penelitian. Adapun lingkup materi yang dimaksud meliputi:

- a. Karakteristik permukiman yang meliputi lokasi, kondisi fisik bangunan dan kondisi sarana dan prasarana kawasan permukiman serta karakteristik masyarakat nelayan yang meliputi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat nelayan.
- b. Tingkat kerentanan fisik, sosial dan ekonomi pada kawasan permukiman.
- c. Strategi peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang dapat meningkatkan nilai ekonomi, sosial, budaya dan fisik kawasan.

2. Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kawasan permukiman kumuh di wilayah pesisir Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan penelitian ini dimaksud yaitu membahas mengenai garis besar dari bab yang akan dibahas didalamnya yang selanjutnya akan terangkum secara sistematis dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan: Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan pada penelitian.



Tinjauan Pustaka: Bab ini menjabarkan tinjauan teori dan kerangka pikir teori-teori yang berkaitan dengan kawasan permukiman, permukiman kumuh, kerentanan permukiman, kawasan pesisir dan masyarakat pesisir,

analisis regulasi yang terkait dengan perumahan dan permukiman dan memuat penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini serta kerangka konsep.

3. Bab III Metode Penelitian: Bab ini mengemukakan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian meliputi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis, definisi operasional dan kerangka penelitian.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum yang menjelaskan kondisi dari wilayah penelitian dan pembahasan dari berbagai hasil kumpulan dan pengolahan data dan hasil analisis mengenai penelitian tersebut.
5. Bab V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020, yang kemudian disingkat PKP adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Perumahan menurut UU No 1 Tahun 2011 adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Adapun permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Dalam mendukung kegiatan yang berlangsung di dalam permukiman dibutuhkan fasilitas fisik pendukungnya berupa sarana dan prasarana pendukung yang berdasarkan Standar Nasional Indonesia Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, 2004 meliputi.

1. Sarana, yang meliputi sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan dan pembelajaran, sarana Kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga
2. Prasarana, yang meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan transportasi lokal.



2.2 Permukiman Kumuh

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian permukiman kumuh, kriteria permukiman kumuh, tipologi permukiman kumuh, karakteristik permukiman kumuh, dan faktor-faktor penyebab terbentuknya permukiman kumuh.

2.2.1 Pengertian Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya.

Permukiman kumuh menurut Rindarjono (2017) adalah permukiman dengan rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Selain itu kepadatan yang tinggi dengan tidak mengindahkan kaidah kesehatan, kebutuhan sarana air bersih yang kurang memadai, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan yang sangat buruk, ruang terbuka yang hampir tidak ada serta kelengkapan fasilitas sosial yang tidak mendukung.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni dengan tampilan fisik yang buruk dan diiringi dengan penurunan kualitas lingkungan serta minimnya sarana dan prasarana pelayanan dasar bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Hunian maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Jayanti, 2018).



2.2.2 Kriteria Permukiman Kumuh

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau berdasarkan 7 aspek utama yaitu:

1. Bangunan gedung, kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung meliputi ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
2. Jalan lingkungan kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan meliputi jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3. Penyediaan air minum, kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum, meliputi akses aman air minum tidak tersediadan kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
4. Drainase lingkungan, kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan, meliputi drainase lingkungan yang tidak tersedia, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dan kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
5. Pengelolaan air limbah, kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
6. Pengelolaan persampahan, kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
7. Proteksi kebakaran, kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup prasarana proteksi kebakaran dan sarana proteksi kebakaran tidak

ia.



2.2.3 Tipologi Permukiman Kumuh

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Secara umum, pembagian tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dijelaskan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh

No	Tipologi	Lokasi
1	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai atau laut dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
2	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar garis sempadan badan air dengan mempertimbangkan kearifan lokal
3	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng $< 10\%$.
4	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng $> 10\%$ dan $< 40\%$
5	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

Sumber: Permen PUPR No.14 Tahun 2018

2.2.4 Karakteristik Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh menurut Kusumo (2022) didefinisikan sebagai lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, rumah berfungsi sekedar tempat istirahat dan melindungi diri dari panas, dingin, dan hujan, lingkungan dan tata permukiman tidak teratur, bangunan sementara, acak-acakan tanpa perencanaan, prasarana kurang, fasilitas sosial kurang, mata pencaharian penghuni tidak tetap dan usaha non formal, tanah bukan milik, pendidikan rendah, penghuni sering tidak tercatat sebagai warga desa, rawan timbulnya penyakit, kebakaran, dan banjir.



Ciri-ciri dari kawasan permukiman kumuh berdasarkan Kusumo (2022), dapat terlihat dari berbagai sisi meliputi:

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
 - a. Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - b. Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
 - c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan bukan hunian liar.
5. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen. Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

Selain itu ciri-ciri permukiman kumuh menurut Jayanti (2018), dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

1. Kondisi rawan lingkungan fisik, yang meliputi rawan banjir, kebakaran, sarana prasarana kurang memadai, sanitasi lingkungan buruk, tidak ada sumber air, perumahan padat dan kurang layak huni. Kondisi ekonomi rendah, dimana dapat dilihat dari penduduknya yang penghasilan rendah dengan tingkat pengangguran tinggi.



3. Kondisi sosial rendah, dimana tingkat pendidikan rendah, tempat sumber kriminalitas tinggi, dan tingkat kesehatan rendah.
4. Aspek hukum, dimana terdapat hunian tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterkaitan masyarakat akan rumah dan lingkungan pada kawasan kumuh bisa sangat kuat, terutama jika mereka tinggal di rumah-rumah kumuh. Karakteristik masyarakat pada kawasan permukiman kumuh menurut Asyah (2014) diukur berdasarkan dua aspek yaitu aspek status sosial dan keterkaitan sosial. Status sosial diukur dengan indikator tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, daerah asal, usia dan jenis kelamin. Sedangkan keterkaitan sosial diukur berdasarkan indikator tingkat kekeluargaan dan kekerabatan serta durasi tinggal.

2.3 Wilayah Pesisir

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian wilayah pesisir, permukiman pesisir, dan karakteristik masyarakat pesisir.

2.3.1 Pengertian Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir menurut Saputra (2019) adalah wilayah pertemuan antara daratan dan laut kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik wilayah kering maupun yang terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan yang ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Kemudian wilayah pesisir menurut Fama (2016) merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan sehingga pengelolaan di bidang perikanan pada wilayah pesisir di Indonesia perlu untuk ditingkatkan karena wilayah pesisir potensial dalam mendukung usaha di bidang perikanan.



2.3.2 Permukiman Pesisir

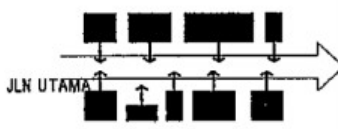
Permukiman pesisir menurut Lautetu, Kumurur, & Warouw (2019) adalah bagian dari permukiman yang dihuni manusia sebagai wadah dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang yang menjadi kesatuan dan terletak pada wilayah daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air dan masih dipengaruhi oleh proses-proses laut. Kawasan permukiman pesisir lebih sering disebut dengan permukiman nelayan, dimana lingkungan tempat tinggalnya sebagian besar dihuni oleh masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan memiliki akses dan keterikatan erat antara penduduk permukiman nelayan dengan kawasan perairan sebagai tempat mencari nafkah meskipun sebagian dari masyarakat masih terikat dengan daratan (Yasa, 2016).

Karakteristik permukiman nelayan menurut Departemen Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya (2001) dalam Islamijati (2019) meliputi:

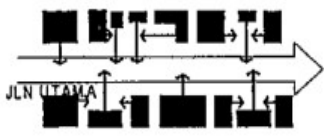
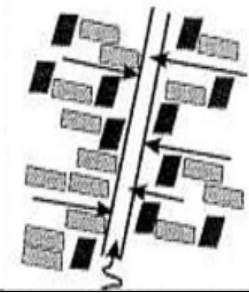
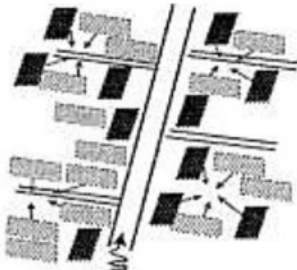
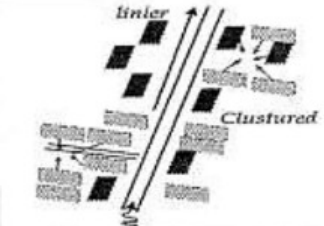
- Permukiman dengan sarana dan prasarana yang menunjang dalam kehidupan masyarakat nelayan
- Tidak jauh dari area perairan dan memiliki akses yang mudah menuju tempat mata pencaharian
- 60% penduduk merupakan nelayan dengan warga yang berprofesi sebagai pengolah dan penjual ikan
- Memiliki saran pendukung seperti tempat pelelangan ikan (TPI), tempat penjemuran ikan dan gudang penyimpanan.

Secara garis besar ciri-ciri permukiman yang berkembang di Indonesia yang berhubungan dengan pola permukiman pesisir menurut Lee Taylor (1980) dalam Rasyidi (2013) dijelaskan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Bentuk dan struktur permukiman pesisir

Pola Permukiman	Uraian	Gambar
A. Pola Permukiman Pesisir		
1. Face to face	Pola struktur linier antara unit hunian sepanjang permukiman dan perletakan pusat aktivitas secara linier: tambatan perahu, ruang penjemuran, tempat pelelangan dan sebagainya.	



Pola Permukiman	Uraian	Gambar
2. Sub-Kelompok Komunitas	Pola cluster dari beberapa unit atau beberapa kelompok unit hunian, memusat pada ruang-ruang penting seperti penjemuran, ruang terbuka umum, masjid, pemimpin kelompok, juragan dan sebagainya.	
B. Struktur Permukiman Pesisir		
1. Linier	Pola sederhana perletakan unit-unit permukiman (rumah, fasos, fasum dan sebagainya) secara menerus pada tepi sungai. Pada pola ini kepadatan belum tinggi dan kecenderungan eskpansi permukiman dan mixed use function penggunaan lahan belum beragam.	
2. Clustered	Pola ini lebih berkembang dengan adanya kebutuhan lahan dan penyebaran unit-unit permukiman telah mulai timbul. Kecenderungan pola ini mengarah pengelompokan unit permukiman terhadap sesuatu yang dianggap dapat mengikat seperti ruang (terbuka) kerja, pemimpin, dan sebagainya.	
3. Kombinasi	Kombinasi antara kedua pola diatas menunjukkan bahwa selain ada pertumbuhan, juga menggambarkan adanya eskpensi ruang untuk kepentingan lain (pengembangan usaha dan lainnya). Pada pola ini telah menunjukkan adanya gradasi dari intensitas lahan dan hirarki ruang mikro secara umum.	

Sumber: (Taylor, 1980 dalam Rasyidi, 2013)

Pola permukiman pesisir menurut Yasa (2016) umumnya akan mengikuti garis pantai (*linear*) dengan kondisi yang biasanya bersifat homogen, tertutup dan mengembangkan tradisi tertentu yang kemudian memiliki ciri khas permukiman. Pada dasarnya pola permukiman yang berada pada wilayah pesisir baik di perairan maupun daratan terbentuk untuk kepentingan masyarakat.

2.3.3 Karakteristik Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir menurut UU No. 27 tahun 2007 merupakan suatu < masyarakat adat atau masyarakat lokal yang bermukim di wilayah ang memiliki adat atau cara tersendiri dalam mengelola lingkungannya arun temurun. Masyarakat nelayan menurut Fama (2016) adalah



masyarakat yang hidup dan berkembang sebagai suatu kesatuan di wilayah pesisir. Meskipun dapat disadari bahwa tidak semua wilayah di kawasan pesisir memiliki penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Karakteristik masyarakat pesisir pada umumnya keras dan bersifat terbuka.

Karakteristik masyarakat pesisir menurut Islamijati (2019) yang ditinjau dari tiga aspek yaitu aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek budaya meliputi:

a. Karakteristik dari aspek sosial

Masyarakat pesisir yaitu memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat serta sikap gotong royong. Hubungan kekeluargaan yang terbangun didalamnya didasarkan atas simpati. Dalam kegiatan mencari nafkah, masyarakat nelayan sangat menonjolkan sifat gotong royong dan saling membantu. Kedua karakter tersebut telah ada di kehidupan masyarakat nelayan yang umumnya memiliki karakter yang tradisional.

b. Karakteristik dari aspek ekonomi

Masyarakat pesisir mayoritas menggantungkan hidupnya pada hasil laut, sehingga pendapatan yang didapat oleh masyarakat nelayan tidak menentu. Kondisi ekonomi masyarakat nelayan ditandai dengan tingkat penghasilan rendah. Penghasilan nelayan dibagi atas dua yaitu penghasilan bersih yang diperoleh “sawi” selama berlayar dan penghasilan sampingan dari pekerjaan tambahan.

c. Karakteristik dari aspek budaya

Kondisi budaya masyarakat pesisir telah diwariskan secara turun temurun yaitu kebiasaan yang tinggal dan mendiami lebih dari satu keluarga dalam satu rumah yang melebihi daya tampung dan tingkat pendidikan rendah yang menyebabkan terhambatnya kemajuan masyarakat karna kurangnya pengetahuan.

Dari pendapat para pakar diatas diketahui bahwa karakteristik permukiman kumuh pesisir sangat beragam. Sumber penelitian ini mengacu pada Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 dan beberapa kajian dari para ahli dimana karakteristik permukiman kumuh dengan tipologi permukiman kumuh di tepi air dibagi atas beberapa aspek. Namun, penelitian ini dibatasi menjadi dua aspek

ak fisik dan aspek non-fisik.



2.4 Kerentanan Permukiman

Kerentanan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 2 tahun 2012 tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana, sehingga apabila terjadi bencana akan memperburuk kondisi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan definisi kerentanan menurut Nugraha (2022) yang menjelaskan bahwa kerentanan adalah upaya mengidentifikasi dampak terjadinya bencana berupa jatuhnya korban jiwa maupun kerugian ekonomi dalam jangka pendek, jangka panjang akibat trauma maupun kerusakan sumber daya lainnya. Kerentanan menurut Setyaningrum (2014) adalah kondisi yang ditentukan oleh berbagai faktor dan proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat meningkatkan rawannya sebuah komunitas terhadap dampak ancaman. Kerentanan permukiman dapat diukur dalam 4 aspek yaitu:

2.4.1 Kerentanan Fisik

Kerentanan fisik menggambarkan suatu kondisi fisik (infrastruktur) yang rawan terhadap faktor bahaya tertentu (BAKORNAS PB, 2007). Indikator kerentanan fisik berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 adalah kepadatan rumah (permanen, semi-permanen dan non-permanen), ketersediaan bangunan/fasilitas umum dan ketersediaan fasilitas kritis.

Kerentanan fisik dapat diukur berdasarkan infrastruktur permukiman dikarenakan infrastruktur merupakan bagian struktural yang menjadi komponen penting yang paling terdampak pertama kali sehingga dapat berdampak besar pada kerusakan bangunan ketika terjadi ancaman bencana (Zamzamy, 2023). Indikator yang digunakan Faiqoh (2017) dalam mengukur tingkat kerentanan fisik yaitu sarana air bersih, akses jamban, kepemilikan rumah dan jenis rumah. Penelitian selanjutnya oleh Mintiea (2018) dalam mengukur tingkat kerentanan fisik/infrastruktur menggunakan indikator kondisi prasarana lingkungan meliputi jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan persampahan.



2.4.2 Kerentanan Sosial

Kerentanan ekonomi menggambarkan suatu kondisi tingkat kerapuhan ekonomi dalam menghadapi ancaman bahaya (BAKORNAS PB, 2007). Indikator kerentanan sosial berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 adalah kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat dan rasio kelompok umur. Sedangkan indikator kerentanan sosial menurut Bungkolo (2017) meliputi tingkat pendidikan, tingkat ikatan sosial, dan kondisi interaksi sosial yang ada di lingkungan permukiman. Kemudian Widodo (2018) dalam penelitiannya mengukur kerentanan sosial menggunakan indikator tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, jumlah penduduk, penduduk cacat, keikutsertaan dalam kelompok, dan jaringan pengaman sosial.

2.4.3 Kerentanan Ekonomi

Kerentanan ekonomi merupakan situasi yang menggambarkan besarnya kerugian atau rusaknya kegiatan ekonomi jika terjadi ancaman bahaya (Chairunnisa, 2023). Indikator yang digunakan untuk menentukan kerentanan ekonomi berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 yaitu luas lahan produktif dalam rupiah (sawah, perkebunan, lahan pertanian dan tambak) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemudian indikator kerentanan menurut Widodo (2018) meliputi pendapatan, jenis pekerjaan, jumlah keluarga miskin, diversifikasi ekonomi, dan status kepemilikan bangunan.

2.4.4 Kerentanan Lingkungan

Lingkungan hidup masyarakat merupakan situasi yang menggambarkan dan hidup suatu masyarakat dan sangat mempengaruhi kerentanan (BAKORNAS PB, 2007). Indikator yang digunakan untuk menentukan kerentanan lingkungan berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 adalah penutupan lahan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau, rawa dan semak belukar).

Kerentanan lingkungan menggambarkan kondisi fisik alam yang bernilai terhadap keberlangsungan hidup manusia didalamnya. Hal tersebut dengan indikator kerentanan lingkungan menurut Idris (2023) yang



mengukur kerentanan berdasarkan topografi wilayah, penggunaan lahan dan jarak bangunan dari garis pantai.

2.4.5 Variabel Kerentanan Permukiman

Variabel kerentanan yang digunakan meliputi kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik dan kerentanan lingkungan. Parameter tiap variabel didapatkan dari hasil sintesis di beberapa literatur. Tabel 3 berikut menunjukkan variabel kerentanan permukiman berdasarkan beberapa literatur.

Tabel 3 Variabel kerentanan menurut beberapa literatur

Variabel	Literatur	Perka BNPB (2012)	Setyaningrum (2012)	Bungkolo (2017)	Widodo (2018)	Choirunnisa dan Giyarsih (2016)	Idris (2023)
Kerentanan Sosial		Kepadatan penduduk	Tingkat pendidikan	Tingkat pendidikan	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Kepadatan penduduk
		Jenis kelamin	Status penduduk	Ikatan sosial	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	Jenis kelamin
		Kemiskinan	Penguasaan bangunan		Usia	Usia	
		Orang cacat	Jumlah anggota keluarga		Jumlah Penduduk	Pendidikan	
			Jumlah anak-anak	Interaksi sosial	Penduduk Cacat		Kelompok umur
			Jumlah lansia		Keikutsertaan dalam Kelompok		
		Kelompok umur	Jumlah penduduk perempuan		Jaringan pengaman sosial	Penduduk Cacat	
			Waktu domisili				
		Lahan produktif	Tingkat pendapatan	Mata pencaharian	Pendapatan	Pekerjaan	
				Tingkat pendapatan	Jenis pekerjaan	Pengangguran	
Kerentanan Ekonomi		PDRB	Pekerjaan	Lokasi pekerjaan	Jumlah keluarga miskin	Jumlah KK Miskin	Angka kemiskinan
					Diversifikasi ekonomi	Sarana Ekonomi	
					Menyewa		
		Hutan lindung					Topografi
		Hutan alam		Jenis rumah			Penggunaan lahan
		Hutan bakau					Jarak dari garis pantai
		Semak					



Variabel	Literatur	Perka BNPB (2012)	Setyaningrum (2012)	Bungkolo (2017)	Widodo (2018)	Choirunnisa dan Giyarsih (2016)	Idris (2023)
		belukar Rawa					

Sumber: (a) Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 (2018), (b) Setyaningrum (2016), (c) Bungkolo (2017), (d) Widodo (2018), (e) Choirunnisa dan Giyarsih (2016), dan (f) Idris (2023)

Berdasarkan Tabel 3 diatas diketahui bahwa dari berbagai teori dari para pakar yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bersumber dari kajian tersebut dan teori yang akan digunakan dalam menentukan kerentanan permukiman kumuh pesisir Kelurahan Lonrae. Penentuan indikator dalam perhitungan tingkat kerentanan permukiman disesuaikan dengan karakteristik dan indikator yang berpengaruh terhadap kerentanan masyarakat kawasan permukiman pesisir Lonrae ketika terjadi bencana. Adapun Tabel 4 berikut menjelaskan indikator yang digunakan dalam menganalisis tingkat kerentanan permukiman.

Tabel 4 Variabel kerentanan permukiman

Aspek	Variabel	Deskripsi	Sumber
Sosial	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan yang semakin tinggi maka kerentanan semakin rendah	Widodo (2018)
	Jenis Kelamin	Apabila jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, maka kerentanan semakin tinggi	Widodo (2018)
	Ikatan Sosial	Semakin tinggi tingkat kekerabatan antar masyarakat, maka kerentanan semakin rendah.	Bungkolo (2017)
	Status Penduduk	Apabila jumlah masyarakat asli lebih banyak daripada masyarakat pendatang, maka kerentanan semakin rendah	Setyaningrum (2012)
	Waktu Domisili	Semakin lama waktu domisili masyarakat, semakin erat dengan pengalaman masyarakat terhadap bencana, maka semakin rendah kerentanannya. Kegiatan gotong royong dalam mengantisipasi bencana berkaitan erat dengan lama bermukim masyarakat.	Chorunnisa (2016)
Ekonomi	Mata Pencarian	Semakin tinggi jumlah penduduk yang bekerja di sektor rentan, maka kerentanan semakin tinggi	Widodo (2018)
	Tingkat Pendapatan	Semakin tinggi jumlah sumber nafkah, maka semakin rendah kerentanannya	Widodo (2018)
	Diversifikasi Ekonomi	Semakin banyak sumber nafkah yang dimiliki keluarga, maka semakin rendah kerentanannya	Widodo (2018)
	Tipe Rumah	Rumah non permanen lebih rentan daripada rumah permanen	Choirunnisa (2016)



Aspek	Variabel	Deskripsi	Sumber
	Kerentanan Infrastruktur (Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Persampahan)	Lingkungan permukiman yang kumuh dengan minimnya infrastruktur seperti sistem pembuangan sampah, akses jamban dan sistem drainase menyebabkan meningkatnya tingkat kerentanan.	Faiqoh (2017)
Lingkungan	Topografi	Semakin rendah topografi suatu wilayah maka semakin kecil selisihnya dengan permukaan air yang mengakibatkan wilayah tersebut lebih rentan terhadap bencana.	Abast (2016)
	Penggunaan Lahan	Penggunaan lahan merupakan parameter yang mudah berubah karena adanya intervensi manusia pada lahan sehingga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kerentanan terhadap bencana.	
	Jarak dari Garis Pantai	Wilayah yang memiliki kemiringan lereng yang lebih kecil kemungkinan akan terjadi penggenangan. Sehingga semakin dekat jarak permukiman dengan pantai maka semakin rentan	

Sumber: (a) Widodo (2018), (b) Bungkolo (2017), (c) Setyaningrum (2016), (d) Faiqoh (2017), (e) Abast (2016) dikembangkan oleh penulis, 2024

2.5 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan Soemarwoto (2004) dalam Mardjuni (2023) adalah kemampuan suatu lingkungan untuk memenuhi perumahan yang baik, yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal bagi penghuninya dan terbentuk atas beberapa unsur meliputi kondisi rumah sebagai kualitas permukiman, prasarana dasar dan sanitasi lingkungannya. Dari sosial ekonomi dapat ditinjau dari pendidikan, pendapatan anggota keluarga dan sebagainya. Dalam usaha untuk memperbaiki mutu hidup, harus dijaga agar kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi.

Penanganan permukiman kumuh menurut Musanna (2016) melalui peningkatan kualitas permukiman dilakukan sebagai upaya yang mampu mendorong tercapainya peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, dan daya beli serta memberikan kontribusi bagi kesehatan lingkungan kota.



Berdasarkan aspek fisik, pola penanganan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Perbaikan atau pemugaran

Pemugaran yaitu kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Pemugaran menurut Syamsiar (2020) dilakukan pada kawasan permukiman kumuh yang lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang, dengan tingkat kepadatan penduduk dan bangunan yang tidak sangat tinggi. Sehingga masih memungkinkan untuk perluasan serta perbaikan bangunan, prasarana dan sarana lingkungan maupun utilitas umum. Penanganan melalui pemugaran.

2. Peremajaan

Peremajaan yaitu cara mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang tidak terbatas pada perbaikan lingkungan fisik namun juga perlu penanaman kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat dan tertata. Peningkatan kualitas atau fungsi permukiman melalui peremajaan dimaksudkan untuk memperbaiki tatanan sosial ekonomi, peremajaan harus dilakukan tanpa menggusur dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum.

3. Permukiman kembali atau relokasi

Permukiman kembali yaitu kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana. Permukiman kembali menurut Supriyanto (2014) dalam Syamsiar (2020) dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan antara kesempatan kerja masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dari aspek non fisik, pola penanganan permukiman kumuh menurut Musanna (2016) dapat melibatkan peran aktif masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat

rus dilakukan dengan upaya penggalan potensi-potensi yang dapat oleh masyarakat setempat, pembinaan teknologi tepat guna, pembinaan i usaha, dan pembinaan kebijakan pendukung.



2.6 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menurut Sugiyono (2013) adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul melalui data sampel atau populasi. Penyajian data dalam analisis statistik deskriptif berupa tabel, grafik, *pie chart*, dan *pictogram*, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentra), perhitungan desil, persentil, diviasi, dan presentase yang kemudian diberikan penjelasan atau pembahasan. Analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel dan populasi serta mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi dan melakukan prediksi dengan analisis regresi.

2.7 Analisis SWOT (*Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats*)

Pada pembahasan analisis SWOT akan dijabarkan mengenai definisi analisis SWOT dan matriks SWOT.

2.7.1 Definisi Analisis SWOT (*Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats*)

Analisis SWOT menurut Argarini (2020) dalam Syahputra (2023) adalah metode perencanaan strategis yang digunakan dalam mengevaluasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Kemudian analisis SWOT yang dijabarkan Rangkuti (2006) dalam Fitry (2022) merupakan metode perumusan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) yang terjadi dari topik tertentu suatu penelitian. Tujuan dilakukan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi objek yang akan dianalisis dimana kekuatan dan kelemahan dikelompokkan kedalam faktor internal, sementara peluang dan ancaman dikelompokkan sebagai faktor eksternal.

2.7.2 Matriks SWOT (*Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats*)



am analisis SWOT terdapat empat kelompok alternatif strategi yang dengan matriks SWOT. Adapun Tabel 4 menunjukkan matriks SWOT.

Tabel 5 Matriks analisis SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (<i>strengths</i>) Daftar kekuatan internal yang dimiliki	Kelemahan (<i>weakness</i>) Daftar kelemahan internal yang dimiliki
Peluang (<i>opportunity</i>) Daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi	Strategi S-O Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W-O Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (<i>threats</i>) Daftar semua ancaman yang dapat diidentifikasi	Strategi S-T Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi W-T Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti (2006) dalam Sari (2021)

Berdasarkan Tabel 5 diatas, matriks analisis SWOT dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Strategi SO (*Strength-Opportunity*)

Strategi SO dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang ada sebesar-besarnya.

2. Strategi ST (*Strength-Threats*)

Strategi ST dibuat berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki lokasi penelitian untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada.

3. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*)

Strategi WO diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

4. Strategi WT (*Weakness-Threats*)

Strategi WT didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, dimana strategi ini berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan lokasi penelitian serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman yang ada.

2.8 Studi Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu merupakan kajian literatur yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini, Tabel 6 berikut menjabarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.



Tabel 6 Rangkuman studi penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Ibrahim Aris dan Umami Fadlilah Kurniawati (2022)	Arahan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang dengan Konsep <i>Livable Settlement</i>	Metode kualitatif dengan menggunakan analisis Delphi dan analisis IPA	1. Kondisi sosial 2. Ekonomi 3. Fasilitas 4. Utilitas 5. Aksesibilitas 6. Fisik	Persamaan: melihat kriteria permukiman berdasarkan beberapa aspek guna peningkatan kualitas permukiman kumuh Perbedaan: Tidak menjabarkan resiko bencana pada studi kasus dan menggunakan konsep <i>Livable Settlement</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima sub <i>variabel livable settlement</i> yang berada pada kuadran I, artinya memiliki tingkat kinerja rendah namun tingkat harapan dari masyarakat sangat tinggi. Kelima sub variabel <i>livable settlement</i> tersebut antara lain Kondisi jalan lingkungan, perbaikan jalan yang berlubang dan jalan yang belum diperkeras aspal. Pendapatan per bulan, melakukan evaluasi program-program kesejahteraan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jenis drainase, perbaikan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan/ecodrain. Penjaga keamanan, pembangunan pos satpam/hansip yang multifungsi beserta penaganya. Sistem pengelolaan air limbah, pembuatan IPAL Komunal yang dapat mengolah air limbah kawasan permukiman	Jurnal Teknik ITS Vol. 11, No. 2 Universitas Teknologi Sepuluh Nopember. 2022. https://ejurnal.it.ac.id/index.php/teknik/article/view/97904
2	Ririn Putri Kusuma dan Dian Rahmawati (2019)	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo	Metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan <i>content analysis</i>	1. Fisik Bangunan 2. Sarana Prasarana 3. Status Lahan 4. Ekonomi 5. Sosial	Persamaan: melihat karakteristik permukiman dari aspek fisik, ekonomi, sosial, status lahan dan sarana prasarana. Perbedaan: tidak menjabarkan resiko dan kerentanan permukiman serta menggunakan metode <i>content analysis</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan Rumusan arahan peningkatan kualitas permukiman di Desa Tambak Cemandi diantaranya melakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan yang belum sesuai dengan persyaratan teknis, penyediaan sarana MCK/jamban secara pribadi bagi masyarakat yang belum memiliki dan penyediaan sistem sanitasi terpadu, penyediaan sarana persampahan di setiap rumah tangga, gerobak sampah tiap RW, dan TPS, serta membangun sistem pengelolaan 3R, diadakannya program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan usaha keterampilan dan bantuan usaha melalui koperasi, pembentukan kelompok swadaya masyarakat serta melakukan pembinaan dan edukasi masyarakat untuk sadar lingkungan, melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat serta adanya upaya penyadaran, penegakan, sanksi ataupun reward	Jurnal Teknik ITS Vol. 8, No. 2 Universitas Teknologi Sepuluh Nopember. 2019. http://ejurnal.it.ac.id/index.php/teknik/article/view/46525
		tifikasi asan uh Dan	Metode analisis deskriptif	1. Vitalitas non ekonomi 2. Vitalitas	Persamaan: menggunakan analisis SWOT dalam	Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kekumuhan di wilayah studi adalah kumuh sedang dengan program-program penataan di wilayah studi berupa	Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi

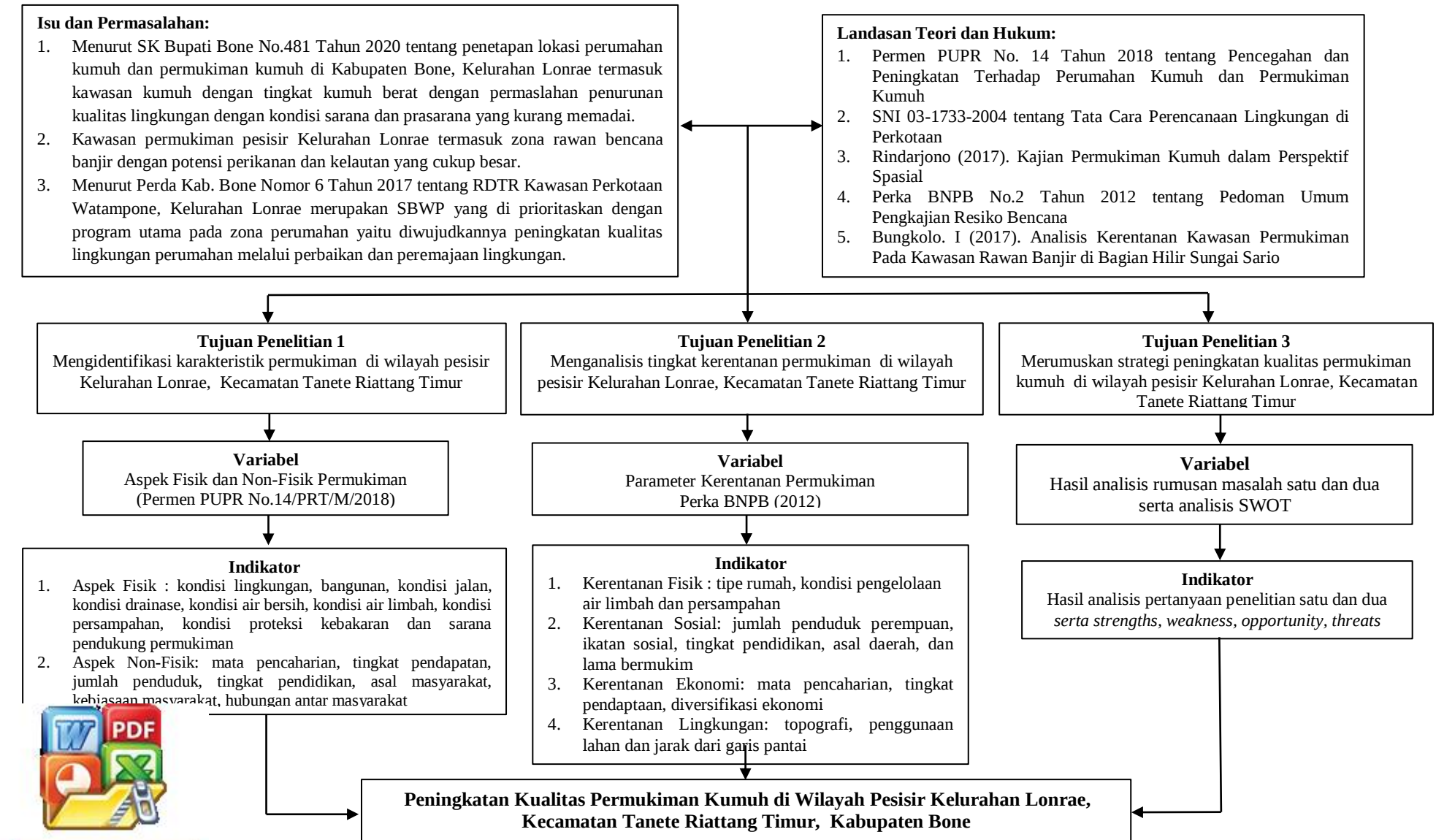


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
		Strategi Penanganannya Pada Permukiman Di Kelurahan Rongas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene	kuantitatif dan analisis SWOT	ekonomi 3. Status tanah 4. Kondisi Sarana dan Prasarana 5. Komitmen pemerintah 6. Prioritas penanganan	merumuskan strategi. Perbedaan: tidak menggunakan variabel komitmen pemerintah dan menganalisis tingkat kekumuhan wilayah dalam mengidentifikasi kawasan kumuh.	program penataan fisik berupa program perbaikan drainase dan peningkatan prasarana jalan serta program non fisik berupa sosialisasi perawatan drainase secara mandiri dan pelaksanaan supervisi terhadap konstruksi drainase agar drainase yang ada dapat berfungsi dengan baik dan lebih tahan lama terutama pada musim hujan.	UIN Alauddin Makassar.2017. http://repository.uin-alauddin.ac.id/7141/ .
4	Ivone Paula Bungkolu, Grace A.J. Rumangit dan Rine Kaunang (2017)	Analisis Kerentanan Kawasan Permukiman Pada Kawasan Rawan Banjir di Bagian Hilir Sungai Sario	Metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi logistik	1. Kerentanan sosial 2. Kerentanan ekonomi 3. Kerentanan lingkungan 4. Kerentanan program 5. Keputusan masyarakat	Persamaan: penelitian ini mengkaji tingkat kerentanan suatu permukiman dengan menggunakan variabel kerentanan sosial, ekonomi dan lingkungan Perbedaan: tidak meninjau tingkat kerentanan permukiman dari aspek kerentanan program dan keputusan masyarakat serta analisis yang digunakan berbeda.	Faktor penyebab yang paling mempengaruhi seseorang tetap bermukim di kawasan rawan banjir bagian hilir Sungai Sario adalah faktor kerentanan sosial tepatnya ikatan sosial, yaitu adanya hubungan kekerabatan yang erat antara anggota masyarakat yang ada dalam lokasi tersebut. Program pemerintah yang paling tepat untuk menangani permukiman kawasan rawan banjir bagian Hilir Sungai Sario adalah dengan pembuatan talud penahan sungai atau pengerukan sungai.	Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat Vol. 13 No. 3A Universitas Sam Ratulangi. 2017. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jisep/article/view/18051

Rahmawati (2019), Syam (2017), Bungkolu, dkk (2017)



2.9 Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 1 Kerangka konsep penelitian

Sumber: Penulis,2023